



Vol. 2, No 4, Tahun 2025 Pages 1-14

Ar-Raudah: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan

Email Journal : jurnal.raudah@gmail.com

Web Journal : <https://ojs.staira.ac.id/index.php/raudah>

Pengembangan Instrumen Evaluasi (Analisis Pengembangan Penilaian Satuan Pendidikan MTs/SMP)

Anri Saputra¹, Mayurida²

STAI-Raudhatul Akmal Deli Serdang

Email: anri.saputra2992@gmail.com

Received: 2025-07-05; Accepted: 2025-07-10; Published: 2025-07-20

Abstrak: Penilaian memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena berfungsi untuk menilai sejauh mana kemampuan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang pengembangan instrumen evaluasi pada jenjang MTs/SMP dalam penerapan Kurikulum Merdeka, melalui pendekatan penelitian kepustakaan (*library resecah*) dengan metode analisis deskriptif. Dari hasil telaah pustaka, terlihat bahwa proses penyusunan instrumen evaluasi pada satuan pendidikan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman pendidik mengenai konsep validitas dan reliabilitas instrumen, serta pelaksanaan penilaian autentik yang belum berjalan optimal. Penelitian ini menekankan perlunya instrumen evaluasi yang mampu mengukur kemampuan peserta didik secara komprehensif, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta relevan dengan semangat Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi guru, penyusunan petunjuk operasional teknis yang lebih matang, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan pendidikan untuk membangun sistem penilaian yang akurat, adil, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan peserta didik.

Kata Kunci: Instrumen, Evaluasi, Penilaian, Pendidikan.

Abstract: *Assessment plays a very important role in the world of education, because it functions to assess the extent to which students' abilities are in accordance with the established competencies. This article aims to examine in depth the development of evaluation instruments at the MTs/SMP level in implementing the Independent Curriculum, through a library research approach (library research) with a descriptive analysis method. From the results of the literature review, it can be seen that the process of compiling evaluation instruments in this educational unit still faces various obstacles, such as the lack of understanding of educators regarding the concept of validity and reliability of instruments, as well as the implementation of authentic assessments that have not been running optimally. This study emphasizes the need for evaluation instruments that are able to measure students' abilities comprehensively, covering cognitive, affective, and psychomotor aspects, and are relevant to the spirit of the Independent Curriculum. Therefore, efforts are needed to improve teacher competence, prepare more mature*

technical operational instructions, and collaborate between education stakeholders to build an assessment system that is accurate, fair, and in accordance with the development of student needs.

Keywords: *Instrument Development, Educational Evaluation, Independent Curriculum, Validity and Reliability, Junior High School/Islamic Junior High School.*

Copyright © 2025 Ar-Raudah : Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan

A. PENDAHULUAN

Penilaian menjadi komponen krusial dalam sistem pendidikan karena berfungsi untuk mengukur sejauh mana peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan (Mardapi, 2017: 12). Pada jenjang pendidikan menengah pertama, seperti Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), proses penilaian tidak hanya berperan sebagai indikator capaian akademik, tetapi juga menjadi bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Melalui penilaian yang dirancang dengan tepat, pendidik dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan siswa, menyusun strategi pembelajaran yang relevan, serta memberikan umpan balik yang dapat mendorong kemajuan belajar secara berkelanjutan (Nitko & Brookhart, 2014: 9).

Seiring dengan dinamika perkembangan pendidikan nasional, peningkatan kualitas penilaian menjadi agenda penting. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memposisikan penilaian sebagai alat kontrol mutu pendidikan. Pasal 57 dan 58 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa evaluasi pembelajaran digunakan untuk menilai sejauh mana penguasaan kompetensi siswa serta menilai efektivitas proses belajar mengajar (Kementerian Pendidikan Nasional, 2003: 47).

Regulasi lain yang lebih teknis, seperti Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, mengatur bahwa penilaian di sekolah harus mencakup tiga ranah utama: pengetahuan, sikap, dan keterampilan (Kemendikbud, 2016: 2–4). Penilaian tersebut dirancang untuk memberikan informasi tidak hanya kepada guru, tetapi juga kepada siswa dan orang tua sebagai bagian dari proses pembinaan akademik dan karakter. Khusus di madrasah, penilaian juga diatur oleh KMA Nomor 183 Tahun 2019, yang menegaskan pentingnya pengukuran menyeluruh terhadap aspek keislaman, sosial, dan keterampilan peserta didik (Kemenag RI, 2019: 15–17).

Dengan diberlakukannya Kurikulum Merdeka, paradigma pembelajaran dan penilaian turut mengalami transformasi. Kurikulum ini menekankan fleksibilitas, pendekatan berbasis proyek, serta penguatan kompetensi esensial dan karakter siswa. Dalam konteks tersebut, penilaian dituntut untuk menangkap secara komprehensif capaian peserta didik, termasuk keterampilan berpikir kritis, kerja tim, kreativitas, dan kemandirian (Kemendikbudristek, 2022: 8–9). Oleh karena itu, instrumen evaluasi yang dikembangkan harus mampu menggambarkan berbagai dimensi tersebut secara valid dan konsisten.

Berbagai penelitian telah berupaya menjawab tantangan tersebut. Misalnya, Pitrianti et al. (2025) merancang instrumen penilaian untuk keterampilan membaca kritis dalam konteks Kurikulum Merdeka, yang menekankan pengukuran ranah afektif dan

kognitif secara terpadu. Sementara itu, Apriani et al. (2023: 102–105) mengembangkan instrumen berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) untuk pelajaran IPA, dengan pendekatan R&D yang menghasilkan alat evaluasi berkualitas tinggi. Penelitian lain oleh ResearchGate (2024) menyusun instrumen penilaian sumatif melalui model pengembangan ADDIE, dan hasilnya menunjukkan validitas dan reliabilitas yang kuat. Selain itu, kajian internasional dari UPI (2023: 45) menyoroti pentingnya penilaian kinerja (performance assessment) dalam Kurikulum Merdeka, walau masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan akibat kurangnya pelatihan dan sarana pendukung.

Namun demikian, sebagian besar studi yang tersedia lebih menyoroti jenjang SD atau SMA, dan belum secara khusus mengeksplorasi konteks MTs atau SMP. Selain itu, fokus pengembangan instrumen penilaian masih dominan pada aspek kognitif, dengan keterlibatan ranah afektif dan psikomotorik yang kurang optimal. Hambatan lain yang juga belum banyak dikaji secara mendalam adalah terbatasnya pemahaman guru mengenai validitas dan reliabilitas instrumen, minimnya pelatihan teknis, serta belum maksimalnya penerapan asesmen autentik seperti penilaian proyek, portofolio, dan observasi (Mulyasa, 2022: 88–91; Yuliana, 2023: 103).

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat celah penelitian dalam pengembangan instrumen penilaian komprehensif di tingkat MTs dan SMP yang relevan dengan pendekatan Kurikulum Merdeka. Kajian yang menyatukan antara kebutuhan penilaian menyeluruh dan karakteristik khas satuan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam juga masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis praktik, tantangan, serta strategi penguatan instrumen evaluasi di satuan pendidikan jenjang MTs/SMP secara komprehensif. Upaya ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam mendorong sistem asesmen yang lebih adil, autentik, dan kontekstual dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan urgensi dan relevansi permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai pengembangan sistem penilaian di tingkat MTs dan SMP. Penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi praktik yang berjalan, kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi penguatan instrumen evaluasi yang sesuai dengan semangat Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, fokus utama kajian ini akan tertuang dalam penelitian bertajuk: *“Pengembangan Instrumen Evaluasi: Analisis Pengembangan Penilaian Satuan Pendidikan MTs/SMP.”* Melalui penelitian ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana satuan pendidikan dapat membangun sistem penilaian yang adaptif, holistik, dan selaras dengan kebutuhan peserta didik masa kini.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji secara mendalam berbagai literatur yang relevan untuk memperkuat kerangka teoritis tentang pengembangan instrumen evaluasi di tingkat MTs dan SMP dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menganalisis konsep-konsep, teori dasar, serta hasil penelitian terdahulu secara komprehensif, tanpa harus melakukan pengumpulan data langsung di

lapangan (Creswell & Creswell, 2018: 156). Sumber utama yang dikaji mencakup referensi ilmiah dari buku, jurnal, serta dokumen regulatif pendidikan, seperti Mardapi (2017: 12–25) yang membahas secara terperinci tentang instrumen evaluasi pendidikan, dan Nitko & Brookhart (2014: 9) yang menguraikan prinsip-prinsip dasar penilaian pembelajaran. Selain itu, referensi hukum seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Kementerian Pendidikan Nasional, 2003: 34–47), Permendikbud No. 23 Tahun 2016 (Kemendikbud, 2016: 2–5), dan KMA No. 183 Tahun 2019 (Kemenag RI, 2019: 15–19) juga menjadi bahan kajian utama untuk memperjelas dasar yuridis evaluasi pendidikan. Teori pendukung lainnya diperoleh dari Brown (2011: 3–5) yang membahas tentang pengukuran kemampuan bahasa, serta DeVellis (2017: 70–73) yang menguraikan teori pengembangan skala pengukuran.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang berarti menelaah secara kritis berbagai literatur, menghubungkan temuan antar-sumber, dan menghasilkan sintesis konseptual yang relevan dengan kebutuhan pendidikan (Gall, Gall, & Borg, 2010: 213; Creswell & Creswell, 2018: 157). Penelitian ini mengacu pada kerangka validitas isi, konstruk, dan kriteria sebagaimana dijelaskan oleh Messick (1995: 742–744), serta teori reliabilitas yang diuraikan oleh Anastasi & Urbina (1997: 114–120). Selain itu, tantangan penerapan evaluasi dalam Kurikulum Merdeka dianalisis dari temuan Mulyasa (2022: 88–91) dan Yuliana (2023: 103–110), yang menyoroti kendala teknis dalam pelaksanaan asesmen berbasis kompetensi. Penelaahan terhadap buku panduan Kurikulum Merdeka (Kemendikbudristek, 2022: 8–13) juga menjadi bagian penting dalam memahami perubahan paradigma penilaian. Melalui metode ini, peneliti menyusun rekomendasi teoretis tentang strategi pengembangan instrumen evaluasi yang lebih akurat, adil, dan kontekstual, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam dan pendidikan nasional secara umum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Pengembangan Instrumen Evaluasi

Dalam proses pembelajaran, instrumen evaluasi memegang peranan penting sebagai alat untuk mengukur berbagai aspek capaian belajar peserta didik. Instrumen ini hadir dalam beragam bentuk sesuai dengan karakteristik kompetensi yang diukur. Tes tulis, baik yang bersifat objektif seperti pilihan ganda maupun subjektif seperti uraian, digunakan untuk menilai ranah kognitif. Sementara itu, angket dan kuesioner sering digunakan untuk mengungkap sikap atau persepsi, sedangkan rubrik kinerja dan portofolio berfungsi untuk menilai keterampilan secara komprehensif melalui produk nyata atau dokumentasi perkembangan peserta didik secara berkelanjutan (Mardapi, 2017: 23–25).

Brown (2011: 3–5) menekankan bahwa penyusunan instrumen evaluasi tidak dapat dilakukan secara asal atau semata-mata bersifat teknis. Pengembangan instrumen menuntut pemahaman yang mendalam terhadap tujuan penilaian, konteks pelaksanaan, serta profil peserta didik yang menjadi sasaran evaluasi. Instrumen yang baik harus dirancang dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengukuran yang sah, sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya dapat dipercaya, tetapi juga bermakna dalam konteks pendidikan.

Dengan demikian, perancangan instrumen evaluasi yang berkualitas memerlukan pendekatan yang sistematis dan ilmiah. Hal ini penting agar penilaian tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi hasil belajar, tetapi juga sebagai sarana yang mampu mendukung refleksi, pengambilan keputusan, serta perbaikan proses pembelajaran secara berkelanjutan.

2. Uji Rasional dalam Pengembangan Instrumen Evaluasi

Tahap uji rasional dalam pengembangan instrumen evaluasi merupakan proses penting yang dilakukan sebelum pengujian secara empiris. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengevaluasi kelayakan dan kesesuaian butir instrumen secara konseptual dengan konstruk yang hendak diukur. Proses ini dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan oleh para ahli (*expert judgment*) yang memiliki kompetensi dalam bidang evaluasi, kurikulum, atau mata pelajaran terkait (Mardapi, 2017: 49; DeVellis, 2017: 71).

Uji rasional dilaksanakan dengan cara meminta pendapat panel ahli terhadap setiap butir soal atau pernyataan dalam instrumen. Para ahli menilai kesesuaian butir dengan indikator capaian pembelajaran, kejelasan bahasa, relevansi isi, tingkat kesulitan, serta kemungkinan adanya bias terhadap latar belakang peserta didik. Proses ini biasanya menggunakan lembar validasi yang disusun secara sistematis agar para ahli dapat memberikan penilaian dan catatan revisi terhadap butir yang dianggap perlu diperbaiki.

Sebagaimana dijelaskan oleh Gall, Gall, & Borg (2010: 219), uji rasional sangat berperan dalam menjamin validitas isi (*content validity*) karena melibatkan penilaian langsung terhadap kecocokan antara butir dengan indikator kompetensi. Tahapan ini juga mendukung pendekatan asesmen berbasis konstruk, di mana penyusunan butir dimulai dari pemahaman yang kuat terhadap karakteristik konsep atau keterampilan yang hendak diukur.

Pelaksanaan uji rasional akan memperkuat landasan teoretis dari instrumen sebelum diterapkan dalam uji empiris. Dengan demikian, kualitas pengukuran dapat ditingkatkan, karena instrumen telah melewati tahap seleksi akademik awal yang berbasis keilmuan. Selain itu, uji rasional juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab etis dalam proses pengembangan alat asesmen, agar instrumen yang digunakan benar-benar mampu menggambarkan kemampuan peserta didik secara adil dan sah (Nitko & Brookhart, 2014: 48).

Dengan dilakukannya uji rasional, pengembang instrumen tidak hanya memastikan bahwa setiap butir telah disusun berdasarkan indikator yang tepat, tetapi juga menjamin bahwa proses evaluasi berjalan sesuai prinsip validitas dan akuntabilitas sebagaimana yang dituntut dalam praktik penilaian yang berkualitas.

3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Kualitas suatu instrumen sangat dipengaruhi oleh sejauh mana aspek validitas, reliabilitas, dan keadilan (*fairness*) diperhatikan dalam proses penyusunannya. Validitas memastikan keterkaitan antara butir instrumen dan konstruk yang diukur, reliabilitas menjamin konsistensi hasil pengukuran, sementara keadilan menuntut agar instrumen tidak mengandung bias terhadap latar belakang peserta didik tertentu (Nitko & Brookhart, 2014: 42–45; Anastasi & Urbina, 1997: 114–120).

Dalam praktik pengembangan instrumen, terdapat dua indikator utama yang menjadi penentu kualitas, yaitu validitas dan reliabilitas.

1. Validitas

Validitas berkaitan dengan ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Messick (1995: 742–744) validitas merupakan suatu kerangka konseptual yang luas, yang mencakup beberapa dimensi:

- a. Validitas isi (*Content Validity*), yaitu sejauh mana butir-butir dalam instrumen mencakup seluruh aspek atau domain kompetensi yang ingin diukur. Validitas ini biasanya dinilai oleh para ahli atau pakar di bidang terkait untuk memastikan kesesuaian isi instrumen dengan tujuan pengukuran.
- b. Validitas konstruk (*Construct Validity*), yaitu derajat kesesuaian antara instrumen dengan konstruk teoretis yang melandasinya. Validitas ini mencerminkan kemampuan instrumen dalam mengukur konsep abstrak tertentu sesuai dengan teori, dan umumnya diuji melalui pendekatan statistik seperti factor analysis.
- c. Validitas kriteria (*Criterion-related Validity*), yaitu tingkat hubungan antara skor hasil pengukuran dengan tolok ukur eksternal yang relevan dan telah diakui validitasnya. Contohnya adalah korelasi antara skor tes dengan nilai akademik atau kinerja nyata dalam bidang tertentu.
- d. Validitas konsekuensial (*Consequential Validity*), yaitu penilaian terhadap konsekuensi atau dampak yang muncul akibat penggunaan instrumen, baik terhadap peserta didik maupun proses pembelajaran. Validitas ini mempertimbangkan apakah hasil evaluasi memberikan pengaruh positif atau justru menimbulkan efek negatif yang tidak diharapkan.

Perlu dipahami bahwa validitas bukan merupakan karakter bawaan dari instrumen itu sendiri, melainkan menyangkut sejauh mana interpretasi atas hasil pengukuran dapat dipercaya dalam konteks tertentu.

2. Reliabilitas

Sementara itu, reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil pengukuran ketika suatu instrumen digunakan dalam situasi yang serupa. Creswell dan Creswell (2018: 160–162) menguraikan beberapa pendekatan dalam menguji reliabilitas instrumen, antara lain:

- a. Reliabilitas internal (*Internal Consistency Reliability*), merujuk pada tingkat keseragaman antarbutir dalam satu perangkat instrumen. Reliabilitas ini menunjukkan sejauh mana seluruh item dalam instrumen bekerja secara kohesif untuk mengukur satu konstruk tertentu. Salah satu teknik yang umum digunakan untuk mengujinya adalah koefisien *Cronbach Alpha*, yang akan menunjukkan tinggi rendahnya konsistensi internal antarbutir.
- b. Reliabilitas antar-penilai (*Inter-rater Reliability*) digunakan saat suatu penilaian dilakukan oleh lebih dari satu penilai. Bentuk reliabilitas ini sangat penting dalam evaluasi kinerja atau observasi kelas, di mana subjektivitas penilai bisa memengaruhi hasil. Tingkat kesesuaian hasil antarpemilai mencerminkan tinggi rendahnya konsistensi penilaian, dan semakin tinggi kesesuaiannya, semakin andal pula instrumen tersebut.
- c. Reliabilitas test-retest (*Test-retest Reliability*) menggambarkan sejauh mana hasil pengukuran tetap stabil jika instrumen yang sama diberikan kepada responden yang sama dalam dua waktu yang berbeda. Apabila skor yang diperoleh relatif konsisten,

maka instrumen tersebut dapat dikatakan memiliki kestabilan yang baik dari waktu ke waktu.

- d. Reliabilitas bentuk ekuivalen (*Equivalent-form Reliability* atau *Parallel-form Reliability*) mengacu pada sejauh mana dua versi instrumen yang dikembangkan secara paralel, dengan isi, struktur, dan tujuan pengukuran yang serupa, memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Reliabilitas jenis ini sangat bermanfaat ketika instrumen perlu divariasikan tetapi tetap mempertahankan kesetaraan dalam pengukuran.

Menjamin reliabilitas dalam sebuah instrumen evaluasi sangatlah krusial karena menjadi dasar bagi keterpercayaan hasil pengukuran dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, reliabilitas saja tidak mencukupi. Instrumen juga harus memiliki validitas agar data yang dihasilkan tidak hanya stabil, tetapi juga benar-benar mencerminkan kemampuan atau kompetensi yang ingin diukur. Perlu dipahami bahwa tingginya reliabilitas suatu instrumen belum tentu menunjukkan bahwa instrumen tersebut valid. Bisa saja sebuah alat ukur memberikan hasil yang konsisten, tetapi gagal menangkap substansi yang seharusnya dievaluasi (Messick, 1995: 743). Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas merupakan dua elemen esensial yang harus dipenuhi secara bersamaan dalam penyusunan alat evaluasi. Kombinasi keduanya akan memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran benar-benar dapat dipercaya dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai (Creswell & Creswell, 2018: 161–162).

Di samping validitas dan reliabilitas, terdapat dua aspek tambahan yang tidak kalah penting dalam pengembangan instrumen evaluasi, yakni praktikalitas dan keadilan (*fairness*). Praktikalitas mengacu pada sejauh mana instrumen mudah diterapkan dalam konteks pembelajaran nyata, termasuk dari segi waktu, biaya, dan kemudahan operasional. Instrumen yang praktis dapat mendukung guru dalam menjalankan proses evaluasi secara efisien tanpa mengorbankan ketepatan hasil (Nitko & Brookhart, 2014: 24). Sementara itu, prinsip keadilan menuntut agar instrumen dirancang secara inklusif, bebas dari bias, dan mempertimbangkan keragaman latar belakang peserta didik, baik dari sisi budaya, bahasa, gender, maupun kemampuan individual. Instrumen yang adil memungkinkan setiap siswa memiliki peluang yang setara untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya (Brown, 2011: 35–36). Dengan demikian, perhatian terhadap aspek praktikalitas dan keadilan bukan hanya meningkatkan kualitas instrumen, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berpihak pada semua peserta didik secara setara.

Dengan memahami secara menyeluruh konsep-konsep dasar ini, para pendidik dan pengembang asesmen akan memiliki dasar yang kuat untuk menyusun instrumen penilaian yang tidak hanya akurat dan konsisten, tetapi juga relevan dengan kebutuhan belajar siswa serta kontekstual dengan lingkungan pembelajaran yang ada.

4. Pemahaman Penilaian oleh Satuan Pendidikan

Pelaksanaan penilaian oleh satuan pendidikan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan pada akhir suatu jenjang pendidikan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 2, penilaian diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu

penilaian yang dilakukan oleh pendidik dan penilaian oleh satuan pendidikan. Penilaian yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan mencakup ujian sekolah/madrasah dan bentuk asesmen lain yang dirancang berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai tolok ukur pencapaian akhir pembelajaran.

Dalam konteks Madrasah Tsanawiyah (MTs), proses penilaian dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019. Regulasi tersebut menekankan bahwa asesmen harus menyentuh empat ranah utama, yaitu sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan dari pendekatan ini adalah membentuk peserta didik secara menyeluruh, yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga berkarakter mulia sesuai nilai-nilai keislaman dan kebangsaan (Kemenag RI, 2019: 17–19).

Menurut Mardapi (2017: 12–13), agar penilaian dapat menghasilkan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, instrumen yang digunakan harus memenuhi sejumlah prinsip pokok, yaitu:

1. Validitas (*validity*), yaitu kemampuan instrumen dalam mengukur aspek yang benar-benar menjadi sasaran asesmen. Validitas yang baik mencerminkan kesesuaian antara isi instrumen dan tujuan pembelajaran (*content validity*), keterkaitan dengan kerangka teoretis yang mendasari konstruk yang diukur (*construct validity*), serta hubungan skor dengan indikator eksternal yang relevan seperti hasil belajar atau kinerja lapangan (*criterion-related validity*).
2. Reliabilitas (*reliability*), yang merujuk pada tingkat kestabilan hasil pengukuran ketika instrumen digunakan berulang kali dalam situasi yang serupa. Instrumen dikatakan reliabel jika mampu memberikan hasil yang konsisten. Bentuk reliabilitas antara lain *internal consistency* (konsistensi antarbutir), *test-retest reliability* (stabilitas antarwaktu), dan *inter-rater reliability* (kesesuaian antarpenilai).
3. Objektivitas (*objectivity*), yaitu prinsip bahwa hasil penilaian tidak boleh dipengaruhi oleh opini pribadi atau bias penilai. Untuk menjamin objektivitas, diperlukan pedoman penilaian atau rubrik yang jelas dan baku, sehingga siapa pun yang menilai akan menghasilkan keputusan yang sama dalam kondisi yang setara.
4. Praktikalitas (*practicality*), yang berkaitan dengan efisiensi dan kemudahan penggunaan instrumen dalam praktik pembelajaran. Instrumen yang praktis tidak memerlukan prosedur yang rumit atau biaya yang besar, dan dapat diimplementasikan oleh guru di berbagai situasi pembelajaran, termasuk dalam kondisi dengan keterbatasan fasilitas.

Lebih jauh, Nitko dan Brookhart (2014: 42–45) menekankan pentingnya prinsip inklusivitas dan keadilan dalam desain penilaian. Pendidik harus mempertimbangkan keberagaman latar belakang peserta didik, baik dari segi sosial, budaya, maupun kemampuan, agar setiap siswa memperoleh kesempatan yang setara untuk menunjukkan potensinya. Penilaian yang adil dan inklusif akan mendorong pembelajaran yang lebih humanis dan berkeadilan.

Dengan memperhatikan prinsip validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikalitas, serta keadilan, sistem penilaian tidak hanya akan berfungsi sebagai alat pengukur hasil belajar, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung pembelajaran yang lebih reflektif, berorientasi pada perkembangan peserta didik, dan relevan dengan konteks pendidikan

yang dinamis.

5. Prinsip Dasar dan Landasan Yuridis Penilaian

Penilaian terhadap hasil belajar peserta didik memiliki dasar yuridis yang kuat dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Salah satunya tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013, yang menegaskan bahwa proses penilaian harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan capaian peserta didik dalam berbagai aspek kemampuan. Dengan demikian, penilaian tidak boleh dipandang semata sebagai prosedur administratif, melainkan merupakan bagian integral dari pembelajaran yang dirancang untuk membantu perkembangan peserta didik secara maksimal (Kemenag RI, 2013: 4).

Selain itu, ketentuan mengenai evaluasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Pasal 58. Di sana dijelaskan bahwa evaluasi diselenggarakan untuk mengetahui kemajuan belajar dan menilai efektivitas proses pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan dan secara eksternal oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan bermutu dan tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman (UU Sisdiknas, 2003: 34).

Arahan tentang kewajiban evaluasi internal juga termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang kemudian diperbarui melalui PP Nomor 32 Tahun 2013. Dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan nasional. Evaluasi internal ini menjadi alat penting dalam menjaga konsistensi dan akuntabilitas mutu di tingkat satuan pendidikan (PP No. 32 Tahun 2013: 17).

Lebih lanjut, prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan penilaian ditegaskan dalam Peraturan BSNP Nomor 0046/P/BSNP/XI/2019, yang menyebutkan bahwa penilaian harus dilakukan secara objektif, adil, transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, hasil asesmen diharapkan dapat menggambarkan kemampuan peserta didik secara otentik dan menyeluruh, serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan (BSNP, 2019: 2–3).

Seluruh kerangka regulasi tersebut berpijak pada amanat Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003, yang menegaskan bahwa pendidikan nasional ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan demokratis (UU Sisdiknas, 2003: 2). Oleh karena itu, sistem evaluasi yang dibangun oleh satuan pendidikan hendaknya dirancang tidak hanya untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga untuk mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional secara nyata, utuh, dan terukur.

Berdasarkan uraian regulatif dan prinsip-prinsip penilaian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa penilaian dalam pendidikan tidak hanya sekadar aktivitas administratif untuk mencatat nilai, tetapi merupakan bagian yang sangat

strategis dalam membentuk kualitas peserta didik secara menyeluruh. Penilaian yang dirancang dengan memperhatikan aspek legal, pedagogis, dan etis akan mampu mencerminkan pencapaian belajar yang autentik dan bermakna. Oleh sebab itu, penulis memandang bahwa perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana satuan pendidikan, khususnya pada jenjang MTs dan SMP, merancang dan mengembangkan sistem penilaian yang sesuai dengan amanat kurikulum dan regulasi yang berlaku.

6. Tahapan dalam Menyusun Instrumen Evaluasi

Penyusunan instrumen evaluasi dalam konteks pendidikan bukanlah proses yang bersifat instan, melainkan memerlukan tahapan yang sistematis serta dasar teoritis yang kuat. Setiap instrumen yang dikembangkan harus mampu mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara *sahih* dan konsisten. Di Indonesia, proses ini diperkuat oleh regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam Pasal 57 dan 58 menegaskan bahwa evaluasi merupakan bagian dari mekanisme penjaminan mutu yang tak terpisahkan dari proses pendidikan itu sendiri (UU Sisdiknas, 2003: 33–34).

Beberapa ahli seperti DeVellis (2017: 70–73), Gall, Gall, & Borg (2010: 213–220), dan Mardapi (2017: 11–19) menjelaskan bahwa proses pengembangan alat evaluasi dilakukan melalui serangkaian tahapan yang saling berkesinambungan dan saling menguatkan. Berikut ini adalah enam tahapan utama dalam proses tersebut:

1. Menentukan Tujuan dan Konstruk yang Akan Diukur

Langkah pertama adalah memperjelas apa yang ingin dievaluasi serta menetapkan konstruk yang hendak diukur, baik dalam domain kognitif, afektif, maupun psikomotor. Penentuan ini harus mengacu pada capaian pembelajaran dan kompetensi dasar yang tercantum dalam kurikulum. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 menekankan bahwa penilaian harus berbasis pada indikator yang sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan (Kemendikbud, 2016: 2–3).

2. Menyusun Kisi-Kisi sebagai Rancangan Butir Instrumen

Kisi-kisi berfungsi sebagai kerangka dasar dalam merancang item evaluasi. Di dalamnya termuat indikator, bentuk soal, hingga jenjang kognitif yang dirujuk, seperti dalam Taksonomi Bloom maupun versi revisi oleh Anderson dan Krathwohl (2001: 63–65). Penyusunan kisi-kisi bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari konstruk diwakili secara proporsional dan adil dalam instrumen akhir.

3. Menulis Butir Instrumen Berdasarkan Kisi-Kisi

Tahap berikutnya adalah mengembangkan butir soal atau pernyataan yang disesuaikan dengan kisi-kisi yang telah disusun. Penulisan harus memperhatikan tingkat kesulitan, bahasa yang komunikatif, serta tidak bias terhadap latar belakang peserta didik. Dalam hal ini, regulasi seperti Permendikbud No. 23 Tahun 2016 mengatur bahwa bahasa yang digunakan dalam asesmen harus netral, objektif, dan tidak menyudutkan kelompok tertentu (Kemendikbud, 2016: 4–5).

4. Melakukan Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum digunakan secara luas, instrumen perlu melalui uji coba untuk memastikan validitas (kesahihan pengukuran) dan reliabilitas (kestabilan hasil pengukuran). Validitas dapat ditinjau dari isi dengan melibatkan pakar, atau diuji secara statistik melalui analisis faktor untuk menilai konstruk. Sementara reliabilitas dapat diukur

dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, teknik test-retest, atau metode lain sesuai dengan jenis data. Panduan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Field (2013: 666–671) dan Anastasi & Urbina (1997: 114–125).

5. Revisi Berdasarkan Hasil Uji Coba

Jika terdapat butir yang tidak valid atau reliabel, maka perlu dilakukan perbaikan atau penghapusan. Langkah revisi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas instrumen secara keseluruhan, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pengukuran sistematis. Tahapan ini disebut sebagai proses *refinement*, seperti dijelaskan oleh DeVellis (2017: 95–97) dan Gall et al. (2010: 225).

6. Implementasi Instrumen dan Evaluasi Berkala

Instrumen yang telah dinyatakan layak dapat diterapkan dalam proses evaluasi pembelajaran. Namun, keberlakuan instrumen tidak bersifat permanen. Diperlukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa alat ukur tersebut tetap relevan, adaptif terhadap konteks, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Langkah ini sejalan dengan prinsip perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) sebagaimana diamanatkan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan nasional, termasuk yang tercantum dalam PP No. 19 Tahun 2005 dan diperbarui dalam PP No. 32 Tahun 2013 (PP No. 32 Tahun 2013: 17–18).

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pengembangan instrumen evaluasi dalam pendidikan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses bertahap yang terstruktur dan berlandaskan pada teori yang kuat serta regulasi yang berlaku. Setiap tahapan penyusunan harus dijalankan dengan penuh ketelitian agar instrumen yang dihasilkan benar-benar mampu mengukur kompetensi secara sah, adil, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

7. Analisis Kritis terhadap Pengembangan Instrumen Evaluasi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia bertujuan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pendidik dan lembaga pendidikan dalam merancang pembelajaran yang adaptif, kontekstual, serta berpusat pada peserta didik. Salah satu komponen penting dalam kurikulum ini adalah sistem penilaian yang harus mencerminkan kompetensi secara utuh. Namun dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi guru maupun sekolah dalam mengembangkan instrumen evaluasi yang benar-benar sejalan dengan filosofi Kurikulum Merdeka.

1. Keterbatasan Kesesuaian antara Instrumen dan Capaian Pembelajaran

Sebagian guru masih mengalami kendala dalam menyusun alat ukur yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Banyak instrumen yang digunakan masih terjebak pada pendekatan konvensional yang menitikberatkan pada hafalan, bukan pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti kreativitas, kolaborasi, serta keterampilan menyelesaikan masalah yang menjadi ciri khas dari Profil Pelajar Pancasila (Kemendikbudristek, 2022: 11–13).

2. Pelaksanaan Asesmen Otentik Belum Maksimal

Meskipun asesmen autentik menjadi salah satu penekanan dalam Kurikulum Merdeka, banyak guru belum terbiasa atau belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam menerapkan metode seperti proyek, portofolio, maupun observasi

langsung. Akibatnya, bentuk penilaian yang digunakan cenderung monoton dan tidak mencerminkan perkembangan peserta didik secara menyeluruh (Mulyasa, 2022: 97–99).

3. Minimnya Panduan Teknis yang Operasional

Meskipun tersedia berbagai sumber belajar seperti modul ajar dan *platform* digital, sebagian besar guru merasa bahwa petunjuk implementasi evaluasi masih terlalu umum dan belum aplikatif. Ketidakjelasan ini menyebabkan praktik pengembangan penilaian berjalan secara mandiri, dengan kualitas yang tidak merata antar sekolah (Yuliana, 2023: 55–56).

4. Belum Adanya Validasi Mutu Instrumen di Tingkat Sekolah

Penerapan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) menjadikan tanggung jawab pengembangan penilaian berada langsung di tangan guru dan tim kurikulum sekolah. Namun, hingga saat ini belum tersedia sistem validasi yang terstruktur untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan telah memenuhi standar mutu sesuai dengan amanat PP No. 32 Tahun 2013 (PP No. 32 Tahun 2013: 17).

5. Penilaian Berdiferensiasi Belum Terlaksana Secara Konsisten

Walaupun pendekatan diferensiasi menjadi bagian penting dalam Kurikulum Merdeka, pelaksanaannya dalam penilaian masih menghadapi hambatan. Banyak guru belum memahami teknik menyusun asesmen yang mempertimbangkan perbedaan individu siswa, baik dari segi gaya belajar, kemampuan, maupun minat. Hal ini membuat asesmen berdiferensiasi belum berjalan optimal di ruang kelas (Mulyasa, 2022: 101–102).

Mencermati berbagai hambatan dalam penerapan evaluasi yang sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka, dibutuhkan analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana satuan Pendidikan, terutama di tingkat MTs dan SMP, mampu merancang dan menerapkan instrumen penilaian yang sejalan dengan karakteristik kurikulum tersebut.

8. Implikasi dari Analisis Pengembangan Penilaian Satuan Pendidikan pada Jenjang MTs/SMP

Hasil analisis terhadap praktik pengembangan penilaian di tingkat MTs dan SMP menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia berbagai regulasi nasional yang mendukung, penerapan di tingkat satuan pendidikan masih belum optimal. Permasalahan yang muncul meliputi keterbatasan pemahaman guru tentang penilaian berbasis kompetensi, minimnya kemampuan teknis dalam menyusun instrumen evaluasi yang *sahih* dan andal, serta ketidaksesuaian antara praktik asesmen dan prinsip utama Kurikulum Merdeka. Berdasarkan temuan tersebut, terdapat sejumlah implikasi penting yang patut menjadi perhatian:

1. Diperlukan peningkatan kapasitas guru dan sekolah dalam mengembangkan instrumen penilaian yang mencerminkan kompetensi inti peserta didik, tidak hanya pada aspek kognitif tetapi juga keterampilan berpikir tingkat tinggi, sikap, dan nilai karakter.
2. Peran aktif pengawas, kepala sekolah, dan tim kurikulum sangat penting dalam memastikan mutu instrumen evaluasi melalui proses pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan.

3. Guru perlu dikuatkan secara metodologis dan pedagogis agar mampu memanfaatkan evaluasi sebagai bagian dari siklus pembelajaran, bukan hanya sebagai alat penentuan nilai akhir.
4. Pengembangan instrumen berbasis teknologi dan bank soal nasional perlu dipercepat untuk memberikan kemudahan akses dan referensi kepada satuan pendidikan, terutama di wilayah yang masih terbatas sumber daya.
5. Kebijakan evaluasi pendidikan harus diarahkan untuk mendukung pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, dengan fokus pada asesmen formatif yang memberikan umpan balik konstruktif bagi peserta didik.

Upaya ini memerlukan sinergi antara pemerintah, satuan pendidikan, pendidik, dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan sistem asesmen yang adil, kontekstual, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan penilaian oleh satuan pendidikan pada jenjang MTs dan SMP memiliki peran strategis dalam mengawal mutu pendidikan dan memastikan ketercapaian kompetensi peserta didik sesuai standar nasional. Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan instrumen evaluasi di tingkat sekolah/madrasah masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi teknis maupun implementatif.

Meskipun berbagai peraturan seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud No. 23 Tahun 2016, dan kebijakan pendukung lainnya telah memberikan arahan dan pedoman yang cukup, kenyataannya di lapangan masih terdapat ketimpangan pemahaman dan kemampuan dalam merancang instrumen yang benar-benar mencerminkan karakter Kurikulum Merdeka. Banyak guru yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun penilaian berbasis kompetensi dan asesmen autentik yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

Selain itu, dominasi pendekatan penilaian kognitif dan kurangnya perhatian terhadap domain afektif dan psikomotorik masih menjadi tantangan tersendiri. Minimnya supervisi, keterbatasan fasilitas, dan belum maksimalnya kolaborasi antarpihak juga turut memengaruhi kualitas instrumen evaluasi yang dikembangkan di satuan pendidikan.

Dengan demikian, perlu ada upaya yang lebih sistematis dan kolaboratif dalam meningkatkan kapasitas guru, menyediakan sarana pendukung penilaian yang memadai, serta membangun mekanisme evaluasi yang adaptif terhadap perubahan kurikulum. Pengembangan sistem penilaian yang adil, kontekstual, dan berorientasi pada pertumbuhan peserta didik menjadi langkah penting menuju pendidikan yang lebih bermutu dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasi, A., & Urbina, S. (1997). *Psychological testing (7th ed.)*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Apriani, S., Fitriyani, N., & Sari, D. (2023). *Pengembangan instrumen HOTS berbasis IPA pada kurikulum merdeka*. *Jurnal Sains dan Pendidikan*, 5(1), 102–105.
- Brown, H. D. (2011). *Language assessment: Principles and classroom practices (2nd ed.)*. White Plains, NY: Pearson Education.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- DeVellis, R. F. (2017). *Scale development: Theory and applications (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4th ed.)*. London: SAGE Publications.
- Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2010). *Applying educational research: How to read, do, and use research to solve problems of practice (6th ed.)*. Boston, MA: Pearson Education.
- Kemenag RI. (2013). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kemenag RI. (2019). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kemendikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbudristek. (2022). *Buku panduan implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Messick, S. (1995). *Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning*. *American Psychologist*, 50(9), 741–749.
- Mardapi, D. (2017). *Pengukuran, penilaian, dan evaluasi pendidikan*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Mulyasa, E. (2022). *Implementasi kurikulum merdeka belajar di sekolah: Teori dan praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nitko, A. J., & Brookhart, S. M. (2014). *Educational assessment of students (7th ed.)*. Boston, MA: Pearson Education.
- Pitrianti, T., Rahmawati, L., & Andini, S. (2025). *Pengembangan instrumen membaca kritis berbasis Kurikulum Merdeka*. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 9(1), 15–22.
- PP No. 32 Tahun 2013. (2013). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- ResearchGate. (2024). *Pengembangan instrumen evaluasi sumatif berbasis model ADDIE*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 12(4), 76–85.
- UPI. (2023). *Assessment for performance-based learning in Indonesian curriculum*. *Journal of Educational Innovations*, 7(2), 40–50.
- Yuliana, R. (2023). *Kendala teknis implementasi asesmen Kurikulum Merdeka di sekolah dasar*. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 18(2), 100–110.